

## ❖ Kajian Multikulturalisme dan Kaitannya dengan Kerukunan

**M. Amin Nurdin**

UIN Syarif Hidayatulah Jakarta

*amin.nurdin@uinjkt.ac.id*

**Abstract:** *Multiculturalism is the best alternative model that can offer a policy of interaction and bilateral enrichment to the dominant culture and the minority culture concerned. While religious pluralism offers a policy that is analogous with integration policy. Religion becomes a resource for value and norms which can influence the way of thinking, mental attitude, and behaviour of the dominant culture and minority culture in the society. Multiculturalism tries to gradually change all the minority cultures to be eventually fit in the batter within the dominant culture without seeing the values and norms of the religions followed. Similar with the liberal-democracy state, ethnic conflict in Indonesia empties into the conflict of local ethnics versus the incoming ethnic (immigrant). Impact of this conflict has caused social crisis and economic crash and the migrant's ethnic environment and eviction from the home where they have lived in so far. Therefore, multiculturalism ideology could become a solution to create harmonious society with fairness and equality without regard to any socio-cultural background.*

**Keywords:** *Multiculturalism, Culture, Ideology.*

**Abstrak:** *Multikulturalisme merupakan sebuah model alternatif terbaik yang menawarkan sebuah kebijakan interaksi dan pengayaan timbal balik pada budaya dominan maupun budaya minoritas yang terkait. Sementara pluralisme agama menawarkan sebuah kebijakan yang analog dengan kebijakan interaksi. Agama merupakan sumber nilai dan norma yang bisa mempengaruhi cara berpikir, sikap mental, dan perilaku budaya dominan dan budaya-budaya minoritas dalam sebuah masyarakat tertentu. Multikulturalisme berupaya merubah secara bertahap semua budaya minoritas agar bisa cocok dengan adonan dalam budaya dominan tanpa menafikan nilai dan norma agama yang dianutnya. Sama halnya dengan negara demokrasi liberal, konflik etnis di Indonesia bermuara pada konflik etnik lokal dengan etnik pendatang. Pengaruh konflik tersebut mengakibatkan krisis sosial dan hancurnya ekonomi dan lingkungan etnik pendatang serta pengusiran dari tempat tinggal yang selama ini mereka huni. Karenaitu, ideologi multikulturalisme merupakan solusi bagi terwujudnya suatu masyarakat yang rukun, berkeadilan, dan kesetaraan tanpa memandang latarbelakang sosial budaya tertentu.*

**Kata Kunci:** *Multikulturalisme, Budaya, Ideologi.*

## Pendahuluan

Bagi masyarakat kontemporer, multikulturalisme sudah menjadi istilah fashionable yang secara luas diterima sebagai konsep sosial yang ideal dalam ideologi negara 'Dunia Baru' vis-a-vis 'Dunia Lama' yang bersifat konservatif, rasis, dan fasis. Secara historis, multikulturalisme merupakan fenomena baru yang muncul seiring dengan mengalirnya para imigran dari 'Dunia Timur' ke negara-negara barat terutama setelah Perang Dunia II dan meningkat pada tahun 1960-an. Imigrasi ini pada gilirannya berakibat kepada perubahan komposisi demografis baik secara etnik, sosial, dan budaya sejalan dengan munculnya *problems of migrant* yang merupakan akibat langsung dari adanya perbedaan budaya yang dibawa dari negara asal dengan prinsip-prinsip nilai yang berkembang dalam kebudayaan negara yang didatangi. Era baru ini menandai munculnya sebuah politik kebudayaan baru tentang perbedaan.

Bagi beberapa negara yang menerapkan demokrasi liberal, pendekatan budaya dan ideologi 'multikultural' dianggap lebih baik daripada pendekatan 'assimilasi' dalam menyikapi realitas keberagaman etnik budaya penduduk pendatang yang menjadi kelompok minoritas di tengah mainstream budaya Kulit Putih. Sebagaimana yang diketahui, pendekatan yang terakhir disebutkan, yakni ideologi asimilasi, dibangun atas asumsi bahwa kaum pendatang diharapkan mampu melepaskan cara hidup lama mereka dengan cara menyesuaikan diri dalam kerangka budaya dan gaya hidup Barat (*western conformism*). Di sini, nilai-nilai kebudayaan barat (pribumi) harus menjadi rujukan utama, sedangkan komponen budaya etnis minoritas pendatang menjadi pelengkap bagi kebudayaan baru itu. Dalam situasi seperti ini maka, sebagai misal, makanan khas etnik minoritas tertentu pada ujungnya dicurigai; bahasa asal mereka dianggap kurang intelektual; kultur yang mereka kembangkan dianggap tidak menguntungkan secara sosial maupun politik. Pada titik tertentu, ideologisasi pendekatan asimilasi ini cenderung rasis dan diskriminatif terhadap segala akses sosial dan negara terhadap para pendatang itu, dan pada ujungnya menjadi lahan subur bagi tumbuhnya sikap etnosentrisme.

Seiring dengan munculnya kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan bagi kelompok minoritas sebagai akibat langsung dari fluktuasi komposisi populasi kaum migran yang membengkak, ideologi asimilasi yang dikembangkan menuai kritik tajam yang memuncak sekitar tahun 1960-an. Pada gilirannya, wacana perbaikan nasib kaum minoritas ini memunculkan sebuah pandangan baru dalam melihat relasi antar-etnis yang dikenal sebagai ideologi multikulturalisme. Betapapun, bagi beberapa kalangan tertentu, wacana multikulturalisme merupakan ancaman bagi identitas nasional dan 'way of life' barat,

namun ideologi ini dipandang mampu memecahkan masalah hak-hak sosial, politik, dan ekonomi kelompok minoritas dan mendorong terwujudnya perlindungan identitas dan budaya kelompok minoritas.

Lalu apa sebenarnya multikulturalisme itu? Harus digaris bawahi bahwa istilah ini memang interpretable dan multi-dimensional. Beberapa sarjana mendefinisikan multikulturalisme sebagai suatu kenyataan sosial adanya kelompok-kelompok masyarakat dari beraneka budaya yang tinggal menetap bersama, suka maupun tidak suka, di sebuah negara. Ada juga definisi multikulturalisme sebagai sebuah tatanan sosial ideal berupa lambang dari prinsip-prinsip keadilan sosial yang mengemukakan tentang hak-hak, nilai, dan kesetaraan kelompok dari berbagai tradisi budaya dan etnik. Pendapat pertama merujuk kepada terma multikulturalisme dalam arti demografi empiris dan fakta sosiologis, sedangkan pendapat kedua merujuk kepada terma ideologis dan konsep normatif tentang *way of life* atau bagaimana seharusnya masyarakat itu diatur (*should be organised*). Kedua terma ini dalam multikulturalisme bisa digunakan secara bergantian. Namun dalam pembahasasn tulisan ini, lebih banyak merujuk kepada terma terakhir.

Pembahasan wacana multikulturalisme tidak hanya berkait dengan masalah toleransi, tetapi juga penerimaan dengan baik budaya lain sebagai sesuatu yang mempunyai nilai yang sama untuk dikembangkan masyarakat itu sendiri. Hal ini terlihat pada tujuan multikulturalisme, yaitu pertama, perekat sosial (*social cohesion*), yang bertujuan agar aneka kelompok dapat berinteraksi dengan berbagai cara guna mencapai kebutuhan bersama; kedua, identitas budaya (*cultural identity*), yaitu hak masyarakat dijamin dan diperbolehkan untuk mengekspresikan dan mewarisi budaya masing-masing, termasuk bahasa dan agama; ketiga, persamaan kesempatan dan akses (*equality and acces*) di mana masyarakat diberi kesempatan dan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan pekerjaan; keempat, rasa tanggungjawab (*equal responsibility*), komitmen dan partisipasi yang sama (*commitment and participation*) yang mensyaratkan kelompok minoritas setia kepada negara melalui rasa tanggungjawab dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan berpegang teguh kepada ideologi multikultural. Apakah multikulturalisme dapat menjadi model alternatif dalam membangun masa depan bangsa? Masalah ini menimbulkan dua pendapat yang dapat dilihat dari sisi negatif dan positif. Pandangan yang negatif mengatakan bahwa multikulturalisme dan etnisitas merupakan suatu ancaman bagi bangsa dan *way of life* Barat. Pendapat sebaliknya mengatakan, ideologi multikulturalisme dan etnisitas mampu memecahkan masalah hak-hak sosial, politik, dan ekonomi kelompok minoritas. Namun dalam kenyataannya,

pendapat negatif yang datang dari kelompok konservatif ternyata tidak mendapat dukungan masyarakat pada umumnya.

Berangkat dari pengalaman negara-negara yang sudah menjadikan multikulturalisme sebagai ideologi, seperti Australia dan Canada yang penduduknya bersifat multi-etnis dan bangsa terlihat mampu meredam ketegangan-ketegangan dan kekerasan-kekerasan dalam bentuk konflik budaya dan agama, termasuk terorisme serta radikalisme. Kedua negara ini, khususnya Australia banyak dijadikan model multikulturalisme di banyak negara dunia dalam membangun suatu kesatuan sosial (*social integration*) dan kohesi sosial (*social cohesiveness*) hingga saat ini.

### **Fase-fase Multikulturalisme**

Di Australia, perkembangan multikulturalisme secara umum dapat dibagi dalam tingkat kebijakan, strategi, dan program dengan melalui dua fase. Fase pertama, penekanan pada keanekaan budaya. Pada fase ini, perlindungan dan pemeliharaan budaya merupakan salah satu faktor kunci untuk dapat memberi dorongan orang untuk mempertahankan warisan budaya mereka dan menghargai tradisi budaya yang beraneka dengan tujuan untuk memperkuat identitas nasional bangsa dan pengayaan (*enrichment*) budaya. Prinsip paling penting dalam hal ini adalah toleransi. Berdasarkan pandangan itu, masyarakat harus memberi penghargaan yang sama pada tradisi budaya orang lain. Di samping itu, adanya kesediaan masyarakat untuk mendorong tradisi-tradisi lain untuk bergerak maju dalam konteks sebuah masyarakat demokratis yang menghormati hak-hak setiap individu. Prinsip kebebasan berbicara dan berekspresi merupakan hak semua individu tanpa memperdulikan latarbelakang etnik, budaya, dan agama. Hal ini diperkuat melalui kebijakan pemerintah dengan diberlakukannya undang-undang anti diskriminasi sosial (*The Racial Discrimination Act*). Undang-undang merupakan legitimasi dalam kerangka *rule of law*. Fase kedua, memasukkan dimensi keadilan sosial sebagai inti dari prinsip multikulturalisme. Tekanan pada tahap ini berarti ideologi ini tidak hanya menekankan pada kemerdekaan pribadi perorangan, tetapi juga tentang keadilan sosial bagi semua. Prinsip dasar di sini adalah setiap orang berhak memperoleh persamaan sosial (*social equity*), terutama persamaan dalam mendapatkan akses dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pemukiman awal, penyediaan sarana informasi, kesejahteraan sosial, dan lapangan kerja.

## Agama dan Multikulturalisme

Lalu bagaimana hubungan multikulturalisme dengan agama? Harus digaris bawahi bahwa persoalan mengemuka ini memang menjadi wacana perdebatan yang cukup panjang. Sebab sebagai sebuah kebijakan, multikulturalisme memang sebuah idealisme yang sekular dan bersifat nilai-nilai umum (public), sementara agama selalu diposisikan dalam spektrum urusan pribadi dan tertutup. Jadi bagaimana keduanya dipertemukan?

Untuk membahas agama dalam konteks multikulturalisme, mengutip Robert Crotty, harus dimulai dari pembahasan mengenai makna kebudayaan itu sendiri. Meminjam definisi budaya Geertz, Crotty beranggapan bahwa kebudayaan pada dasarnya adalah sebuah sistem simbol yang diwariskan turun temurun. Kebudayaan bersifat dinamis, adaptif dan bukan statis atau deterministik. Kebudayaan memberikan ketertiban di dunia di mana baik kelompok maupun individu bisa memperoleh maknanya sendiri-sendiri. Multikulturalisme adalah sebuah kebijakan yang mencari cara memelihara berbagai bentuk budaya dalam sebuah masyarakat tertentu.

Tiap agama harus dilihat sebagai sebuah sistem budaya yang menawarkan ketertiban dan pemaknaan pada titik-titik kritis munculnya ancaman kekacauan (chaos). Kebenaran yang Mutlak (*Ultimacy*) adalah representasi simbolik dari ketertiban dunia. Tiap individu dalam masyarakat dunia sekuler dihadapkan dengan sederet budaya agama dan budaya dunia sekuler yang bisa saja mempunyai pandangan-pandangan dunia yang saling bertabrakan. Keragaman ini menyebabkan kemungkinan pluralisme agama di mana semua budaya agama diakui sebagai sebuah varian, namun juga menjadi simbolisasi Kebenaran yang Mutlak.

Crotty lebih lanjut memperkenalkan sebuah kerangka nilai-nilai yang besar yang bisa disandang bersama oleh budaya dominan dan budaya-budaya minoritas dalam sebuah masyarakat tertentu. Assimilasi, misalnya, berupaya merubah secara bertahap semua budaya minoritas agar bisa cocok dengan adonan dalam budaya dominan. Sedangkan multikulturalisme merupakan sebuah model alternatif terbaik yang menawarkan sebuah kebijakan interaksi dan pengayaan timbal balik pada budaya dominan maupun budaya minoritas yang terkait. Pluralisme agama menawarkan sebuah kebijakan yang analog dengan kebijakan interaksi.

Senada dengan Crotty, Malory Nye mengatakan posisi agama dalam multikulturalisme harus pertama-tama mengasumsikan adanya kebebasan dalam mempratekkan agama apa pun yang diproduksi oleh berbagai budaya. Karena itu, agama dalam hal ini perlu dipikirkan ulang (redefinisi) sebagai

pandangan yang terbuka dan bukan yang essensialistik. Pandangan terbuka sebagaimana yang dimaksud Nye adalah inklusivisme agama yang merupakan salah satu faktor utama keberhasilan multikulturalisme, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa satu budaya agama yang benar, walaupun budaya agama lain bisa saja memiliki kebenaran meski hanya sebagian dibanding dengan budaya mereka.

Dalam konteks multikulturalisme, etnosentrisme dan eksklusivisme agama merupakan faktor disintegratif bagi terwujudnya pencapaian tujuan akhirnya, yaitu integrasi dan kohesi. Karena sikap-sikap tersebut akan membuka ruang konflik antara multikulturalisme sebagai suatu identitas bangsa di satu pihak dan etnik budaya dan agama di lain pihak. Bagaimanapun ethnosentrisme menolak pemyarungan masyarakat multikultural sehingga menjadikannya ancaman. Demikian juga dengan eksklusivisme agama, yang menganggap budayanya sebagai kebenaran dan sistem simbol satu-satunya yang diakui.

Bagi masyarakat masyarakat Barat, citra eksklusif kerap dialamatkan kepada masyarakat muslim, karena itu mereka dianggap memiliki potensi konflik yang membahayakan multikulturalisme. Akibatnya, sebagaimana terlihat dalam perkembangan multikulturalisme dalam beberapa tahun belakangan mengalami degradasi, khususnya setelah peristiwa 11 September . Degradasi itu ditandai dengan bangkitnya kembali aspirasi ideologi asimilasi (monokulturalisme) di Inggris dan Australia. Dalam tabel berikut ini, digambarkan adanya tantangan-tantangan besar yang bernuansa konflik bagi kelangsungan kehidupan masyarakat multikultural yang dihadapi negara-negara demokrasi liberal dan negara-negara lainnya. Dalam hal ini, kasus muslim Australia mungkin bisa menjadi gambaran konflik antara identitas multikulturalisme sebagai identitas bangsa dan sikap eksklusif agama.

**Tabel Perbedaan antara Empat Model Identitas Muslim Australia**

<b>Model Identitas</b>	<b>Orientasi Waktu</b>	<b>Dasar Loyalitas</b>	<b>Hubungan Sosial</b>	<b>Mentalitas</b>
Keagamaan	Dulu, sekarang, dan Masa depan	Agama (Islam)	Muslim	Ekklusif dan Formalistik
Moderat	Dulu, Sekarang, dan Masa Depan	Negara Australia, tapi Budaya dan Agama Negara Asal	Orang Australia dan Negara Asal	Inklusif dan Substansialist
Kosmopolitan	Utamakan Masa Depan	Universal	Antar Bangsa	Pluralime
Nasionalis	Utamakan Dulu dan Masa Depan	Negara Asal	Negara Asal	Ekklusif

## Multikulturalisme Indonesia dan Kerukunan

Dalam sejarah Indonesia, ketegangan dan konflik etnis, agama, budaya, dan politik telah menjadi bagian dari potret interaksi masyarakat. Sejak menjelang kemerdekaan hingga era reformasi, masalah ini tidak pernah terselesaikan. Perbedaan primordial sering menjelma menjadi pertentangan, sehingga pada gilirannya melahirkan ketidaknyamanan hidup bersama. Pergantian rezim sekan tidak berarti pergantian mental dan budaya konflik dan kekerasan. Sementara masyarakat tidak juga merasa menjadi bagian dari upaya menciptakan kehidupan harmonis dalam perbedaan itu.

Tidak hanya kekerasan dan konflik horisontal semacam itu. Kekerasan struktural (*state violence*) yang dilakukan negara (pemerintah) yang bentuk puncaknya adalah *state terrorism* terus memperumit masalah interaksi horisontal. Masyarakat yang cenderung tidak menghargai perbedaan seringkali dipengaruhi oleh kekerasan-kekerasan pemerintah dan aparaturnya, selain tentu saja elit-elit dan tokoh-tokoh politik dan agama. Politik pemerintah yang tidak demokratis atau diskriminatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat baik yang bersifat keagamaan, budaya, etnik, maupun politik, tak terasa menjadi pembenaran tindakan-tindakan serupa pada akar rumput yang berbentuk anarkisme atau bahkan terorisme.

Ide Persatuan nasional, meski sering sangat efektif untuk meredam keinginan berpisah dan bercerai atau sekedar berontak, ternyata bagi banyak kelompok masyarakat berfungsi sekedar untuk menakut-nakuti. Harapan sebagian besar masyarakat untuk dihargai identitas, agama, etnis, kelompok politiknya tidak kunjung dipenuhi, yang ada hanya dengan slogan “Persatuan Nasional”.

Slogan lain Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu telah kehilangan daya gebrak tentang pentingnya hidup bersama dalam perbedaan. Tunggal Ika lebih ditekankan ketimbang Bhineka, sehingga akhirnya melahirkan persatuan semu (*pseudo-unity*). Dengan kata lain, Bhineka Tunggal Ika belum mampu secara efektif mengakomodir perbedaan masyarakat Indonesia. Hal ini juga terlihat pada prinsip monokulturalisme yang cenderung digunakan pada rezim Soeharto terlihat kurang menghargai kebhinekaan, tetapi lebih mementingkan Tunggal Ika. Di sini, barangkali perlu pelurusan pengertian atau penerjemahan istilah warisan budaya ini dengan mempertimbangkan sebuah kebijakan multikulturalisme untuk menata ulang pengelolaan keragaman budaya (*managing cultural diversity*) untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa dan negara.

Masalah yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah masyarakat majemuk (plural) terpusat pada aspek hubungan antara pihak pemerintah atau sistem nasional dan kelompok etnik. Pemerintah dalam hal ini, sejak rezim Soekarno hingga Megawati ini belum membangun sebuah kebijakan nasional yang bersifat strategis. Masing-masing mempunyai kebijakan sendiri-sendiri di dalam pengelolaan keberagaman. Soekarno, misalnya, menggunakan kebijakan amal-gamasi. Soeharto, seperti dijelas di atas, sementara Habibie terjebak antara ide demokrasi dan pengaruh despotis Suharto dan pendekatan militer. Namun pada masa Gus Dur, ide multikulturalisme mulai menampakkan diri.

### **Penutup: Kerukunan Basis Multikulturalisme**

Sama halnya dengan negara demokrasi liberal, konflik etnis di Indonesia bermula pada konflik etnik lokal dengan etnik pendatang. Pengaruh konflik tersebut mengakibatkan hilangnya kehidupan masyarakat dan hancurnya ekonomi dan lingkungan etnik pendatang serta pengusiran dari tempat tinggal yang selama ini mereka huni. Pada umumnya faktor disintegrasi tersebut disebabkan oleh persaingan sumber-sumber ekonomi, posisi, dan kekuasaan, yang kemudian sering bergeser menjadi konflik keagamaan.

Di sini perlunya kebijakan multikulturalisme sebagai kebijakan politik negara dalam kerangka pembentukan masyarakat multikultural yang sehat. Namun hal ini tidak bisa dilakukan secara *taken for granted* dan *trial error*, sebaliknya diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated*, dan *berkesinambungan*. Beberapa langkah yang paling strategis untuk mengelola keragaman, tidak hanya menyangkut persoalan agama, tetapi sekaligus etnik, antara lain, pertama, pembentukan institusi, seperti Lembaga Urusan Multikultural (Indonesian Institute of Multicultural Affairs) dan Kantor Urusan Multikultural (The Office of Multicultural Affairs). Kedua badan ini bertugas menciptakan kerangka Kebijakan Agenda Nasional, menerbitkan buku-buku, mengadakan bank of research, dan menyiapkan tenaga ahli sehingga memudahkan perolehan pengakuan kelembagaan dan terciptanya komitmen di pihak Pemerintah pada prinsip-prinsip multikulturalisme. Alternatif lain, pemerintah perlu membentuk Komisi Urusan Etnis dan Agama (Ethnic Affairs Commission) untuk dijadikan semacam *social engineering* untuk mereformasi multikulturalisme Indonesia dengan menyusun sebuah agenda Nasional bagi terwujudnya multikulturalisme bangsa.

Kedua, langkah strategis lainnya adalah melalui pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan formal dan non-formal dalam masyarakat luas. Tahap pertama bentuk pendidikan ini bisa



dalam bentuk pendidikan interkultural sebagai wujud cross-cultural untuk mengembangkan nilai-nilai universal yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat berbeda. Pada tahap ini, pendidikan interkultural ditujukan untuk mengubah tingkah laku individu agar tidak meremehkan budaya atau kelompok lain, khususnya kalangan minoritas. Selain itu juga ditujukan untuk timbulnya toleransi dalam diri individu terhadap berbagai perbedaan rasial, etnis, agama, dan lain-lain. (Azra, 2000). Tahap berikutnya ditujukan bagaimana mengelola dan memelihara serta memperkaya warisan kultural yang terdapat dalam masyarakat sehingga masing-masing kelompok bisa saling berbagi (sharing) dan saling memiliki.

### **Daftar Bacaan**

- Abbas, Tahir, Religion, Radicalism and Multiculturalism: Indonesia and UK Experience, International Seminar Paper, Muhammadiyah dan British Council, 30 Januari, Jakarta, 2006.
- Advisory Council on Multicultural Affairs, Towards a National Agenda for a Multicultural Australia: A Discussion Paper, Commonwealth of Australia, Canberra, 1988.
- Australian Council on Population and Ethnic Affairs, Multiculturalism for All AusTralians: Our Developing Nationhood, Commonwealth of Australia, 1982.
- Arivia, Gadis, "Multikulturalisme: Re-imaging Agama", dalam Jurnal Refleksi, vol.VII,no.1, 2005, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN, Jakarta.
- Azra, Azyumardi, Konflik Baru antar Peradaban, Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Baubock, Reiner et all (eds.), The Challenge of Diversity: Integration and Pluralism in Societies of Immigration, Avebury, Vermont, 1996.
- Black, Alan (ed.), Religion in Australia: Sociological Perspective, Allen and Unwin Sydney, 1991
- Carens, Joseph H. & Melissa William S., 'Muslim Minorities in Liberal Democracies: The Politic of Misrecognition, in Rainer Baubock (at al), The Challenge of Diversity: Integration and Pluralism in Societies of Immigration, Avebury, EngLand, 1996
- Castles, Stephen (ed), Mistaken Identity: Multiculturalism and Demise of Nationalism in Australia, Pluto Press, Sydney, 1988
- Departement of Prime Minister and Cabinet Office of Multicultural Affairs, National Agenda for a Multicultural Australia, Australian Government Publishing Service, Canberra, 1989

- Habel, Norman C. (ed), *Religion and Multiculturalism in Australia*, Australian Association for the Study of Religious (AARS), Adelaide, 1992
- Jupp, James, 'One among Many', in David Goodman (at al), *Multicultural: The Challenge of Change Australia*, Scribe, Victoria, 1991
- Lopez, Mark, *The Origins of Multiculturalism in Australian Politic 1945-1975*, Melbourne University Press, Melbourne, 2000
- Martin, Jean I., *The Migrant Presence: Australian Responses 1947-1977*, Allen & Unwin, Sydney, 1978.
- Suparlan, Parsudi, "Ethnicity and Its Potential for Social Disintegration in Indonesia", dalam *Communal Conflicts in Contemporary Indonesia*, Pusat Bahasa-Bahasa, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002.
- Vasta, Ellie, "Multiculturalism and Ethnic Identity: The Relationship between Racisms and Resistance", in *Australian and New Zealand Journal of Sociology*, vol. 29, no. 2, August 1993.